

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah semakin matang dan banyak factor yang akan mempengaruhi percepatan perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Salah satu faktor penting yaitu faktor hukum¹. Arah perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang secara signifikan akan dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur hukum perbankan syariah di Indonesia². Langkah-langkah perbaikan dalam perbankan syariah mengalami berbagai proses perbaikan terutama pada peraturan dan kebijakan pemerintah. Selain dikeluarkannya peraturan mengenai perbankan syariah juga diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Namun dikeluarkannya pasal tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif seperti pasal 68 UU No. 21 Tahun 2008 yang menyebutkan:

1. *Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50%(lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank umum syariah.*
2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”*

¹ Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet.1, Jakarta:Sinar Grafika hal.56

² Suryani, *Implikasi Dan Tantangan Lahirnya Undang Undang No.21 TAHUN 2008 Tentang Perbankan Syariah*, *Iqtishadia*, Vol.8, No.2, September 2015, Hal.357

Pasal tersebut mengandung peraturan kapitalisasi perbankan syariah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Usaha Unit Syariah (UUS) yang sudah memiliki modal sebesar 50% atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak disahkannya UU ini maka diharuskan untuk melakukan pemisahan atau *spin off* unit syariahnya³. Pengertian *spin off* menurut pasal 1 angka 32 UUPS yaitu pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 selain memberikan hak bagi Bank Umum Konvensional untuk melepas atau memisahkan UUS yang dimiliki, pada ketentuan peralihan pasal 68 justru mewajibkan Bank Umum Konvensional yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemisahan UUS. Adanya pasal tersebut juga pada tahun 2023 yang akan datang, UUS diwajibkan untuk melakukan *spin off*. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka bank akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mensiasati hal tersebut, industri perbankan mencari solusi agar tidak dikenakan sanksi juga tidak perlu melakukan *spin off* yaitu dengan melakukan *leverage*. Namun hal ini masih menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan perbankan. *Leverage* merupakan penyaluran pembiayaan syariah melalui kantor cabang induk perusahaan. Bank Umum Syariah (BUS) akan menggunakan cabang milik bank umum konvensional dalam menawarkan produk-produk syariah. Sistem tersebut sebenarnya hampir sama dengan *office channeling* yang sudah berjalan, hanya saja *office channeling* terbatas pada

³ Khotibul Umam, 2009, *Tend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No.21 Tahun 2008(Konsep,Regulasi dan Implementasi)*, cet 1 ,yogyakarta: BPFE-yogyakarta hal 92

penghimpunan dana (*funding*). Dengan *leverage* model, bank umum konvensional dapat menyalurkan pembiayaan syariah dengan menggunakan akad-akad syariah dan ketentuan syariah.

Leverage model memiliki banyak manfaat, *pertama*, mendorong peningkatan pertumbuhan perbankan syariah. Adanya sistem *leverage model* diharapkan dapat meningkatkan ekspansi pembiayaan perbankan syariah. Kebijakan ini sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan aset perbankan syariah. Namun bank syariah harus lebih agresif dalam menghimpun dana masyarakat (DPK). Selama ini bank syariah juga kekurangan likuiditas. Hal tersebut terlihat dari bank syariah yang berada di atas 100%. Untuk itu dana haji wajib ditempatkan di bank-bank syariah agar likuiditas bank syariah cukup dan memadai. *Kedua*, *leverage model* akan meningkatkan efisiensi perbankan syariah karena cara ini akan membantu Bank Umum Syariah (BUS) untuk mengurangi biaya ekspansi pembukaan cabang baru yang jauh lebih mahal. Dengan demikian sistem *leverage model* akan lebih efektif dan efisien dalam pemasaran produk tanpa harus membuka jaringan kantor baru serta menurunkan beban operasional bank syariah⁴.

Pada penerapan *leverage model* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi antara bank umum konvensional dan bank syariah harus

⁴ Ahmad Syaikhon, 2013, leverage model bank syariah, <http://www.neraca.co.id/article/27596/Leverage-Model-Bank-Syariah>, di akses pada 24 april 2018 pukul 23.10.wib

terintegrasi. Jika sistem informasi terintegrasi maka transaksi yang terjadi dapat langsung tercatat di bank syariah.

Leverage memang dapat dijadikan cara alternatif guna menghindari kegiatan *spin off*. Namun *leverage* merupakan suatu penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum terjadi bilamana seseorang atau pihak-pihak tertentu mempergunakan berlakunya hukum asing dengan cara-cara yang tidak benar dengan maksud untuk menghindari hukum nasional. Akibat dari penyelundupan hukum asing adalah batal demi hukum⁵.

Untuk menerapkan *leverage model* di perbankan syariah perlu diperhatikan mengenai sistem *-leverage* yang harus sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai masalah dalam kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syariah juga diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan. Maqasid syariah sebagai tujuan islam untuk mensyariatkan ajaran islam dari hukum dan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, industri perbankan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan pasal 68 UU Nomor 21 tahun 2008. Perbuatan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan

⁵ Umar Said Sugiarto, S.H., M.S., 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet 5, Jakarta: Sinar Grafika, hal 309

yang harus ditaati karena merupakan jaminan hukum yang berisi keadilan dan untuk memajukan keadilan maka peraturan harus ditaati⁶.

Perilaku industri perbankan yang tidak memberlakukan Pasal 68 Nomor 21 Tahun 2008 pada dasarnya tidak akan menjadikan industri perbankan menjadi lebih maju atau sebaliknya. Hal ini karena pada pasal tersebut mendorong bahkan memaksa para pelaku bisnis syariah untuk merubah bank umum konvensional yang memiliki layanan syariah menjadi bank syariah dalam waktu singkat. Mengingat pasar bank syariah di Indonesia diyakini sangat menjanjikan dan cukup berhasil.

Dengan adanya *leverage* diharapkan menjadi solusi bagi perbankan syariah untuk menghindari *spin off*. Hal tersebut merupakan penyimpangan yang tidak diketahui oleh masyarakat umum di Indonesia bahkan di industri perbankan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul **“PELAKSANAAN LEVERAGE DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BANK BPD JATENG SYARIAH SURAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses terjadinya leverage ?
2. Apakah system leverage sesuai dengan maqasid syariah ?

⁶ Asikin zainal,2012,*Pengantar Tata Hukum Indonesia*,Rajawali Press,jakarta

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya leverage didalam suatu perbankan syariah
2. Untuk mengetahui apakah *system leverage* ini sesuai dengan maqasid syariah?

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum lembaga keuangan pada umumnya terlebih dalam memahami perkembangan perbankan yang ada di Indonesia baik itu konvensional maupun syariah.

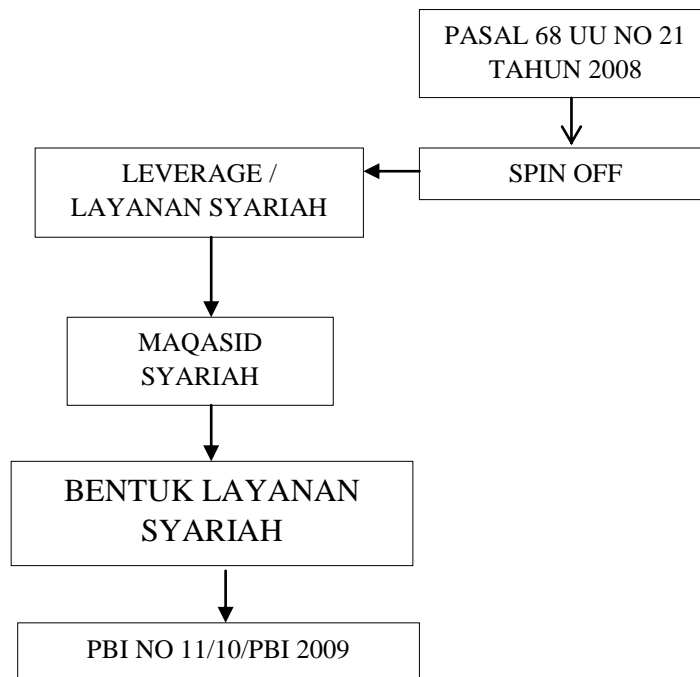
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis khususnya para pembaca untuk memahami perkembangan secara keseluruhan dari perbankan yang ada di Indonesia yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait

dengan hubungan antara asas kepastian hukum dengan leverage yang di fungsikan di perbankan syariah

- c. Dapat menjawab segala pertanyaan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat bahwa bagaimana kelanjutan disahkan nya pasal 68 UU no 21 tahun 2008 apakah dengan adanya leverage dapat memberikan solusi bagi perbankan syariah yang pecah dari induknya dan mampu berdiri sendiri ataukah sebaliknya (mengalami kebangkrutan).

Kerangka Pemikiran



Untuk meningkatkan peran perbankan syariah di dalam pelayanan keuangan di Indonesia, maka pemerintah di bentuk Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008. Upaya peningkatan dilakukan dengan adanya pasal 68 yang mengatur tentang perbankan syariah. Pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban industri perbankan syariah melakukan *spin off* terhadap UUS yang dimilikinya. Kewajiban *spin off* itu terjadi, *dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induk atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank umum syariah.*

Spin off menggambarkan suatu gambaran atau produk turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Pemisahan ini berbeda bentuk, tetapi umumnya memerlukan perubahan pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan serta kelemahan yang akan dihadapi apabila terjadi penurunan dalam segi apapun di perbankan⁷. Hal ini akan memberatkan bagi sebagian industri perbankan syariah yang memiliki UUS. Oleh karena itu untuk menghindari dilakukannya *spin off* dan penjatuhan sanksi karena tidak melakukan *spin off*, maka industri perbankan melakukan leverage. *Leverage* akan memberikan solusi bagi perbankan untuk tidak melakukan *spin off* dan tidak akan mendapatkan sanksi. Kemudian leverage disamakan dengan layanan syariah ketentuan aturan telah diatur di PBI No 11/10/PBI/2009 tentang usaha unit syariah. Agar proses leverage ini sesuai dengan prinsip syariah maka diterapkannya maqasid syariah sebagai wadah aturan syariah yang ada.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan⁸. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

⁷ Mnur rianto al arif dan endah putrid dewanti, 2017, *Metode Spin Off dan Tingkat Profitabilitas Studi pada Bank Umum Syariah Hasil Spijn Off* , Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam IQTISHADIA Vol.10 Nomor 1, 2017, hal.30

⁸ Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal 2

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengacu pada sumber data dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis untuk melihat bagaimana implementasi dilapangan terkait dengan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan *leverage* di perbankan syariah, khususnya di bank JATENG SYARIAH

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak⁹. Sehingga tujuannya untuk memberikan data dengan ketelitian tinggi secara sistematis dan menyeluruh mengenai gambaran asas kepastian hukum dalam Pelaksanaan *leverage* di perbankan syariah khususnya di bank JATENG SYARIAH

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Bank JATENG SYARIAH yang berada di Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Jenis Data

⁹ Soejono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta lapangan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan kepala Bank JATENG di Surakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data data lain yang berhubungan dengan penelitian. Yang berkaitan dengan ini yaitu melalui studi kepustakaan antara lain buku buku, jurnal hukum, artikel,dokumen dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia, Surat edaran Bank Indonesia dan putusan pengadilan yang ada hubungannya dengan Objek penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung untuk mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan mengenai asas kepastian hukum dalam pelaksanaan *leverage* di perbankan syariah khususnya di bank JATENG.

2) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan tentang kronologis kasus yang terjadi sebenarnya. Selain itu juga untuk mengetahui pendapat dari pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan masalah asas kepastian hukum dalam pelaksanaan *leverage* di perbankan syariah. khususnya di bank JATENG

6. Metode Analisis Data

Setelah data selesai terkumpul dengan lengkap maka tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, melalui apa yang telah dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil analisis¹⁰.

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

¹⁰ Lexy J Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.12.

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang masalah mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan leverage di perbankan syariah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian dari perbankan syariah, pengertian dari leverage beserta tujuannya, menjelaskan tentang asas kepastian hukum dan hubungan kepastian hukum dengan pasal 68 UU No 21 tahun 2008 perbankan syariah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini menjelaskan mengenai hubungan pelaksanaan leverage dengan Maqasid syariah yang ada pada pasal 68 Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 dan kinerja perbankan syariah apabila system leverage di terapkan di Bank JATENG Syariah di Surakarta.

BAB IV KESIMPULAN, Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran mengenai pelaksanaan leverage di perbankan syariah di Bank JATENG Syariah Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA